

BAB IV

P E N U T U P

IV.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 dikategorikan **memuaskan**, karena nilai capaiannya di atas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Di antara capaian 19 (Sembilan Belas) Tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 14 (duabelas) Tujuan dengan Capaian Memuaskan dan Sangat Baik, 2 (dua) Tujuan dengan capaian Baik serta 3 (tiga) Tujuan dengan capaian Cukup Baik. sehingga perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang agar capaian menjadi Memuaskan atau Sangat Baik adalah :

1. Meningkatkan Perluasan Lapangan Kerja, dengan capaian Kinerja Baik;
2. Memperluas dan Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, dengan capaian Kinerja Baik ;
3. Meningkatkan Net Eksport Perdagangan Dalam dan Luar Negeri , dengan capaian Kinerja Cukup Baik;
4. Meningkatkan Percepatan Kinerja Sektor Industri, dengan capaian Kinerja Cukup Baik; dan
5. Meningkatkan Percepatan Kinerja Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri serta Investasi Daerah, dengan Capaian Kinerja Cukup Baik.

IV.2. PERMASALAHAN

IV.2.1. Meningkatkan perluasan lapangan kerja.

Hal-hal yang menjadi penyebab belum optimalnya kinerja perluasan lapangan kerja dikarenakan :

- a. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada bulan Agustus 2016 berkurang sebanyak 324.681 orang menjadi 19.950.000 orang. Jumlah penduduk Jawa Timur yang bekerja berdasarkan data bulan Agustus 2016 juga turun menjadi 19.110.000 orang atau berkurang 266.777 orang ; dan
- b. Upah Minimum Kab./Kota (UMK) di Jawa Timur tahun 2016 naik cukup sebesar 9,344 % (rata-rata UMK Jawa Timur tahun 2016 sebesar Rp. 1.692.210,00) menyebabkan sentimen negatif tentang jaminan keamanan dan investasi biaya tinggi.

IV.2.2. Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan.

Hal-hal utama penyebab ketidak berhasilan penurunan PMKS di Jawa Timur antara lain :

- a. Kurang sinkronnya kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan penanganan terhadap PMKS; dan
- b. Lemahnya SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial.

IV.2.3. Meningkatkan Net Eksport Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.

Menyebab utama belum tercapainya kinerja Net Eksport Perdagangan Dalam dan Luar Negeri antara lain :

- a. Belum efisennya sistem logistik dan konektivitas antar daerah;.
- b. Masih rendahnya pertumbuhan sub sektor perdagangan lebih disebabkan oleh defisit migas dan jasa yang semakin membesar;.

- c. Belum optimalnya intensitas perdagangan antar daerah karena belum tersedianya informasi pasar antar daerah;
- d. Belum stabilnya harga produk agro dikarenakan panjangnya mata rantai distribusi perdagangan; dan
- e. Semakin tingginya persaingan dipasar internasional dan belum lancarnya proses ekspor serta masih belum optimalnya promosi perdagangan luar negeri dikarenakan masih berfokus pada pasar tradisional.

IV.2.4. Meningkatkan Percepatan Kinerja Sektor Industri .

Hal-hal utama yang menjadi mempengaruhi Kinerja Sektor Industri antara lain :

- a. Adanya kenaikan UMK, BBM, TDL dan Harga Tanah;
- b. Masih sulitnya proses perijinan di daerah;
- c. Melambatnya realisasi investasi;
- d. Terbatasnya ketersediaan kawasan industri;
- e. Besarnya ketergantungan bahan baku / penolong impor; dan
- f. Masih rendahnya produktifitas dan daya saing Industri Kecil Menengah.

IV.2.5. Meningkatkan Percepatan Kinerja Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri serta Investasi Daerah..

Hal-hal utama yang mempengaruhi nilai capaian ataupun realisasi kinerja investasi antara lain :

- a. Masih banyaknya izin-izin lanjutan yang harus dipenuhi oleh penanam modal;
- b. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan prosedur perinjinan sesuai SOP di Kabupaten/Kota (Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin HO, Izin Pemanfaatan Ruang);
- c. Masih banyaknya peraturan Daerah yang tidak pro Bisnis dalam pelaksanaan penanaman modal;

- d. Terbatasnya lahan sehingga belum seluruhnya di Kabupaten /Kota mempersiapkan kawasan industri dalam mengantisipasi masuknya perusahaan PMA/PMDM diluar kawasan dan perusahaan baru; .
- e. Masih banyaknya dokumen/lampiran berupa hardcopy yang diperlukan untuk persyaratan pengurus izin lanjutan; dan
- f. Kurang memadainya kualitas Sumber daya Manusia (SDM) yang tersedia dan banyaknya tuntutan yang kurang normatif.

IV.3 LANGKAH KEDEPAN

Langkah kedepan yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kinerjanya antara lain :

IV.3.1. Meningkatkan perluasan lapangan kerja :

- a. Program cegah PHK guna menahan bertambahnya pengangguran baru.
- b. Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal dan informal melalui AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara).
- c. Pengembangan dan perluasan jejaring informasi pasar kerja melalui layanan penempatan “Ayo Kerja Jatim”.
- d. Membuka jaringan Bursa Kerja ke daerah lain dan provinsi lain, perguruan tinggi, dan SMK di Jawa Timur secara *online*, juga menyelenggarakan bursa kerja bulanan (*mini job fair*) serta menggalakkan bulan pasar kerja di Kabupaten/Kota.
- e. Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) disertai sertifikasi kompetensi tenaga kerja di 16 UPT Pelatihan Kerja (BLK), didukung dengan implementasi Pola 3in1 (pelatihan-sertifikasi-penempatan).

- f. Revitalisasi UPT Pelatihan Kerja (BLK) melalui *upgrading* Instruktur, penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan, dan modernisasi peralatan pelatihan.
- g. Pembinaan di sektor informal melalui pelatihan/pembinaan dan pendampingan usaha mandiri (wirausaha).
- h. Memperbanyak program magang di perusahaan bagi peserta pelatihan di UPT Pelatihan Kerja Disnakertransduk Prov. Jawa Timur, mendorong pelaksanaan magang mandiri, serta magang ke luar negeri (Jepang).
- i. Meningkatkan peran Unit Reaksi Cepat (URC) Ketenagakerjaan dan fungsi LKS Bipartit untuk menciptakan harmonisasi hubungan industrial.
- j. Melakukan pendataan korban PHK dan membekali pelatihan melalui Pelatihan Alih Kerja (PAKER).
- k. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalisasi keberangkatan TKI non prosedural.

IV.3.2. Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan meningkatkan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah provinsi Jawa Timur melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan terhadap PMKS;
- b. Melakukan peningkatan koordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam memperluas jangkauan pelayanan terhadap PMKS; dan
- c. Mendorong Bidang dan UPT dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk membuat inovasi-inovasi pelayanan terhadap PMKS.

IV.3.3. Meningkatkan Net Eksport Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.

Dalam rangka peningkatan realisasi kinerja perdagangan pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Orientasi peningkatan volume perdagangan non migas;
- b. Optimalisasi kinerja Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di 26 Provinsi mitra melalui kegiatan misi dagang, temu bisnis, promosi dan pembentukan trading house, database perdagangan antar daerah;
- c. Pengembangan Jatim Mart, yaitu showroom produk dan jasa Jawa Timur (B2B) diluar negeri, baik showroom secara fisik maupun secara online, Showroom secara fisik akan dibangun di 10(sepuluh) negara ASEAN mulai tahun 2016 s/d 2020, dimulai dengan Singapura dan Vietnam di tahun 2016. Juga di China dan Eropa; dan
- d. Peningkatkan promosi dan ekstensifikasi ekspor ke pasar non tradisional yang salah satunya melalui pembentukan perwakilan dagang di negara-negara sister province.

IV.3.4. Meningkatkan Percepatan Kinerja Sektor Industri:

- a. Peningkatan daya saing produk unggulan Jawa Timur melalui fasilitasi standarisasi, HKI dan peningkatan teknologi;.
- b. Percepat realisasi investasi melalui fasilitasi kemudahan perijinan dan pemberian insentif, serta perbaikan iklim usaha/investasi;.
- c. Bangun industri hulu guna substitusi ketergantungan bahan baku impor dan penumbuhan industri hilir;.
- d. Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) secara peripurna, berkesinambungan dimulai dari stimulan bahan baku, proses pengolahan, sampai pemasarannya;
- e. Mempercepat pembangunan lahan kawasan industri di semua Kabupaten/Kota;

- f. Pengembangan klaster industri produk-produk unggulan Jawa Timur potensi ekspor;
- g. Menjaga iklim usaha yang kondusif di Jawa Timur, untuk menarik investor asing dalam Penanaman Modal Asing (PMA); dan
- h. Pengembangan IKM Premier.

IV.3.5. Meningkatkan Percepatan Kinerja Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri serta Investasi Daerah

Dalam rangka meminimalisir tersebut dan sebagai langkah peningkatan Realisasi Kinerja Penanaman Modal pada tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Terus melakukan inovasi untuk meminimalkan izin-izin yang harus dipenuhi oleh penanam modal;
- b. Melakukan Koordinasi dan Pembinaan yang lebih intensif dengan instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyediakan lahan pembangunan sektor Kawasan Industri;
- d. Memperbaiki iklim investasi yang berdaya saing melalui peningkatan pelayanan dan mempromosikan peluang investasi unggulan; dan
- e. Memacu para penanam modal yang telah memiliki Izin Prinsip untuk segera merealisasikan investasinya melalui pemberian fasilitas kemudahan perizinan, pengadaan lahan usaha dan lainnya serta mediasi penyelesaian masalah yang mungkin timbul

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jawa Timur yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2016 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur.